

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) adalah standar akuntansi keuangan yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal 24 Oktober 2016 dan diberlakukan efektif 1 Januari 2018 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). Standar ini disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018), “Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (EMKM) merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia selama dua tahun berturut-turut”. SAK EMKM merupakan standar akuntansi yang dibuat sederhana karena mengatur transaksi umum yang dilakukan oleh EMKM dan dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis sehingga cukup mencatat asset dan liabilitasnya sebesar biaya perolehannya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

Standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri yang dapat digunakan oleh entitas yang memenuhi definisi entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan sebagaimana yang diatur dalam SAK ETAP dan karakteristik dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018), ruang Lingkup SAK EMKM disebutkan di dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, kecil, dan Menengah yang berbunyi sebagai berikut:

1. SAK EMKM dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil dan menengah.
2. Entitas mikro kecil dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP), yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

di Indonesia, setidaknya-tidaknya selama 2 tahun berturut-turut.

3. SAK EMKM dapat digunakan oleh entitas yang tidak memenuhi definisi dan kriteria dalam SAK ETAP jika otoritas mengizinkan entitas tersebut untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

SAK EMKM disusun cukup dengan sederhana dan mudah digunakan sebagai suatu usaha yang tergolong kecil dan menengah. SAK EMKM terdiri dari Laporan Laba Rugi, Laporan Posisi Keuangan, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Menurut Purnama (2018), SAK EMKM hanya memiliki tiga laporan sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan, menyebutkan laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan.

ENTITAS			
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
31 DESEMBER 20X8			
ASET	CATATAN	20X8	20X7
Kas dan Setara kas		xxx	xxx
Kas	3	xxx	xxx
Giro	4	xxx	xxx
Deposito	5		
Jumlah kas dan setara kas		xxx	xxx
Piutang usaha	6	xxx	xxx
Persediaan		xxx	xxx
Beban dibayar dimuka	7	xxx	xxx
Aset tetap		(xx)	(xx)
Akumulasi penyusutan		xxx	xx
JUMLAH ASET			x
LIABILITAS		xx	
Utang Usaha		x	xx
Utang bank	8	xx	x
JUMLAH LIABILITAS		x	xx
EKUITAS		xx	
Modal		x	xx
Saldo laba (defisit)	9		x
		xx	
		x	xx
		xx	x
		x	xx
			x
JUMLAH EKUITAS		xxx	xxx
JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS		xxx	xxx

Sumber : Ikatan Akuntansi Indonesia SAK EMKM, 2018

Gambar 2.1 Laporan Posisi Keuangan

2. Laporan Laba Rugi selama periode
Laporan Laba Rugi adalah laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha Perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan Laba Rugi merupakan kinerja keuangan entitas untuk suatu periode akuntansi perusahaan.

ENTITAS			
LAPORAN LABA RUGI			
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X8			
PENDAPATAN	<u>Catatan</u>	<u>20X8</u>	<u>20X7</u>
Pendapatan usaha	10	xxxxxx	xxx
Pendapatan lain-lain		xxx	xxx
JUMLAH PENDAPATAN			xxx
BEBAN			
Beban usaha		xxx	xxx
Beban lain-lain	11	xxx	xxx
JUMLAH BEBAN			xxx
LABA (RUGI) SEBELUM			
PAJAK PENGHASILAN		xxx	xxx
Beban pajak penghasilan	12	xxx	xxx
LABA (RUGI) SETELAH			
PAJAK PENGHASILAN		<u>xxx</u>	xxx

Sumber : Ikatan Akuntansi Indonesia SAK EMKM, 2018

Gambar 2.2 Laporan Laba Rugi

3. Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan atas laporan keuangan disajikan dengan sistematis, juga memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Standar Akuntansi Keuangan EMKM menyebutkan dalam catatan atas laporan keuangan memuat:
- Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM.
 - Ikhtisar kebijakan akuntansi.
 - Informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

ENTITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 20X8

1. UMUM

Entitas didirikan di Jakarta berdasarkan akta nomor XX tanggal 1 Januari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris, S.H., Notaris di Jakarta dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. XX 2016 tanggal 31 Januari 2016.

Entitas bergerak dalam bidang usaha manufaktur. Entitas memenuhi kriteria sebagai entitas mikro, kecil, dan menengah sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008.

Entitas berdomisili di Jalan XXX, Jakarta Utara.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan yang disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan menengah.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.

c. Piutang Usaha

Piutang usaha disajikan sebagai jumlah tagihan.

d. Persediaan

Biaya persediaan bahan baku meliputi biaya pembelian dan biaya angkut pembelian. Biaya Konversi meliputi biaya tenaga kerja langsung dan *overhead*. *Overhead* tetap dialokasikan ke biaya konversi berdasarkan kapasitas produksi normal. *Overhead variabel* dialokasikan pada unit produksi berdasarkan penggunaan aktual fasilitas produksi. Entitas menggunakan rumus biaya persediaan rata-rata.

e. Aset Tetap

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya jika aset tersebut dimiliki secara hukum oleh entitas. Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan penjualan diakui Ketika tagihan diterbitkan atau pengiriman dilakukan kepada pelanggan. Beban diakui saat terjadi.

g. Pajak Penghasilan
Pajak penghasilan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

3. KAS

	20x8	20x7
Kas Kecil-Jakarta	xxx	xxx

4. GIRO

	20x8	20x7
PT Bank xxx – Rupiah	xxx	xxx

5. DEPOSITO

	20x8	20x7
PT Bank xxx – Rupiah	xxx	xxx
Suku bunga – Rupiah	xxx	xxx

6. PIUTANG USAHA

	20x8	20x7
Toko A	xxx	xxx
Toko B	xxx	xxx

7. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

	20x8	20x7
Sewa	xxx	xxx
Asuransi	xxx	xxx
Lisensi dan Perizinan	xxx	xxx
JUMLAH	xxx	xxx

8. UTANG BANK

Pada tanggal 4 Maret 20x8, Entitas memperoleh pinjaman Kredit Modal Kerja dari PT Bank ABC dengan maksimum kredit Rpxxx, suku bunga efektif 11% per tahun dengan jatuh tempo berakhir 19 April 20x8. Pinjaman dijamin dengan persediaan dan sebidang tanah milik entitas.

9. SALDO LABA		
Saldo laba merupakan akumulasi selisih penghasilan dan beban, setelah dikurangkan dengan distribusi kepada pemilik.		
10. PENDAPATAN PENJUALAN		
	20x8	20x7
Penjualan Retur	xxx	xxx
Penjualan	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx
11. BEBAN LAIN		
	20x8	20x7
Bunga Pinjaman	xxx	xxx
Lain-lain	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx
12. BEBAN PAJAK PENGHASILAN		
	20x8	20x7
Pajak Penghasilan	xxx	xxx

Sumber : Ikatan Akuntansi Indonesia SAK EMKM, 2018

Gambar 2.3 Catatan atas Laporan Keuangan

2.1.1 Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk ke dalam usaha berskala kecil yang memiliki kriteria masing-masing. Menurut IAI dalam SAK EMKM (2018:1), “UMKM merupakan Entitas Mikro, Kecil, dan menengah (EMKM) tanpa akuntabilitas publik yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya-tidaknya selama dua tahun berturut-turut”. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dapat dijelaskan pengertian UMKM sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2008.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa UMKM ialah usaha ekonomi berskala mikro, kecil dan menengah yang dimiliki orang perorangan atau badan usaha. UMKM memiliki kriteria tersendiri yang membuat usaha ekonomi tersebut dapat digolongkan sebagai usaha baik mikro, kecil, maupun menengah.

2.1.2 Kriteria UMKM

UMKM memiliki beberapa kriteria yang mendefinisikan setiap usaha yang dilakukan seseorang atau badan usaha. Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bahwa kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dikategorikan sebagai berikut:

1. Kriteria usaha mikro
 - a. Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.0000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria usaha kecil
 - a. Usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria usaha menengah
 - a. Usaha yang kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.0000.000 (Sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Tabel 2.4
Kriteria UMKM

No	Ukuran Usaha	Total Aset (Rp)	Pendapatan (Rp)
1.	Mikro	Maksimal Rp50.000.000	Maksimal Rp 50.000.000
2.	Kecil	Lebih dari Rp50.000.000 – Rp500.000.000	Lebih dari Rp300.000.000 -Rp 2.500.000.000
3.	Menengah	Lebih dari Rp500.000.000	Lebih dari Rp2.500.000.000- Rp50.000.000.000

Sumber: Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa ukuran usaha yang dimiliki dapat dikelompokkan berdasarkan total aset yang dimiliki dan pendapatan yang dihasilkan. Pengelompokan ini telah diatur dan menjadi patokan dalam mengelompokkan suatu usaha ekonomi.

2.2 Perbedaan SAK ETAP dan SAK EMKM

SAK ETAP merupakan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk pengguna eksternal. Standar yang digunakan adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP dijadikan sebagai tolak ukur untuk suatu badan usaha kecil dalam Menyusun laporan keuangannya. SAK ETAP disusun berdasarkan PSAK IFRS, namun lebih disederhanakan dan disesuaikan sesuai dengan kondisi di Indonesia. SAK ETAP lebih mudah diimplementasikan oleh UMKM dibandingkan PSAK IFRS. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018), terdapat beberapa penyederhanaan yang terdapat dalam SAK ETAP yaitu:

- a) Tidak ada laporan laba rugi komprehensif
- b) Menggunakan harga perolehan
- c) Tidak menggunakan pilihan nilai wajar revaluasi atau nilai wajar
- d) Tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan

ETAP dinilai kurang efektif dan masih kurang dapat dipahami oleh UMKM sehingga diperbarui kembali dengan menerbitkan 24 SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro dan Menengah). *Exposure Draft* SAK EMKM disahkan oleh Dewan Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI dalam rapatnya pada tanggal 18 Mei 2016. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perbedaan antara SAK ETAP dan SAK EMKM

Perbedaan	SAK ETAP	SAK EMKM
Persediaan	SAK ETAP akan mengukur nilai persediaan akan mencari nilai yang rendah diantara biaya perolehan dan harga jual itu setelah diukur biaya penyelesaian.	SAK EMKM akan mengukur nilai persediaan memperoleh dan akan dicatat sebesar nilai biaya perolehan tersebut.

Berdasarkan uraian perbedaan di atas, dapat diketahui bahwa pada SAK ETAP nilai persediaan akan dihitung dari nilai terendah dari biaya perolehan, sedangkan pada SAK EMKM mencatat nilai biaya perolehan yang terjadi. Nilai persediaan dihitung untuk mendapatkan harga jual dan HPP.

2.3 Pengertian Akuntansi

Akuntansi membantu perusahaan untuk memantau kondisi laporan keuangan mereka secara berkala. Dengan mencatat semua transaksi keuangan, perusahaan mendapatkan suatu hasil laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang memberikan suatu gambaran tentang keuangan perusahaan tersebut.

Menurut Agie Hanggara (2019:1), "Akuntansi merupakan proses identifikasi, melakukan pencatatan, pelaporan data-data atau informasi ekonomi yang bermanfaat sebagai penilaian dan pengambilan keputusan". Menurut Sugiri dan Riyono (2020:1), "Akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi dan mencatat transaksi keuangan, sehingga dapat

menghasilkan informasi yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh-oleh pihak yang berkepentingan”. Sedangkan menurut Yadiani & Wahyudin (2020:6-7), “Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan kejadian suatu ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan”.

Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan proses pengidentifikasi, mengklasifikasi, mencatat suatu transaksi kejadian yang berhubungan dengan suatu laporan keuangan. Akuntansi merupakan sistem informasi pengelolaan data serta pelaporan data suatulaporan keuangan perusahaan.

2.4 Persediaan

2.4.1 Pengertian Persediaan

Persediaan secara umum merupakan salah satu jenis aktiva lancar yang jumlahnya cukup besar dalam suatu Perusahaan. Hal ini agar mudah dipahami karena persediaan merupakan faktor yang penting dalam menentukan kelancaran operasi perusahaan.

Persediaan merupakan bentuk investasi, dari mana keuntungan (laba) itu bisa diharapkan melalui penjualan di kemudian hari. Jumlah minimal persediaan suatu perusahaan harus dipertahankan untuk menjamin kontinuitas dan stabilitas penjualan yang dilakukan perusahaan dalam kegiatan bisnisnya. Persediaan termasuk dalam aktiva lancar, hal ini dikarenakan jumlah kas yang dimiliki akan terus bertambah seiring dengan penjualan barang yang dilakukan secara tunai. Pernyataan mengenai persediaan menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 14 bahwa “Persediaan adalah asset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha bisnis, dalam proses produksi penjualan tersebut atau dalam proses produksi atau pembelian jasa”. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam SAK EMKM (2018: 9), “Persediaan merupakan prinsip-prinsip pengakuan, pengukuran, dan penyajian persediaan yang dianggap sebagai aset untuk dikelola dalam proses produksi dan dijual atau dalam bentuk bahan baku untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa”. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) No.9

Tahun 2018 yang dimaksud dengan persediaan adalah:

- a. Aset untuk dijual dalam kegiatan usaha modal yang akan menghasilkan pendapatan,
- b. Aset dalam Proses produksi yang diolah untuk dikategorikan sebagai barang jadi yang akan dijual,
- c. Aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Perusahaan manufaktur memiliki beberapa jenis persediaan barang yang dikategorikan berdasarkan keadaan persediaan tersebut. Menurut Weygant, dkk (2018:296), menyatakan bahwa perusahaan manufaktur biasanya mengklasifikasikan persediaan menjadi tiga kategori sebagai berikut:

- a. Persediaan barang jadi (*Finished goods inventory*) merupakan barang produksi yang selesai diproses dan siap untuk dijual
- b. Persediaan dalam proses (*work in process inventory*) merupakan bagian persediaan barang produksi yang telah masuk proses produksi tetapi belum selesai
- c. Persediaan bahan baku (*raw materials*) merupakan barang-barang dasar yang akan digunakan dalam proses produksi tetapi belum dimasukkan ke dalam proses produksi.

Berdasarkan dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa persediaan merupakan suatu jenis aktiva yang sangat penting yang dimiliki oleh perusahaan. Jenis-jenis perusahaannya yaitu perusahaan dagang dan perusahaan industri untuk kegiatan bisnis operasional.

2.4.2 Jenis-Jenis Persediaan

Persediaan pada suatu perusahaan perlu dilakukan klasifikasi berdasarkan jenis dan kegiatan bisnis suatu perusahaan tersebut. Tujuan dari pengklasifikasian itu sendiri agar suatu pencatatan persediaan dijamin keakuratannya. Berdasarkan Biswan dan Mahrus (2019:131), diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Persediaan pada Perusahaan Dagang (*Marchandise Inventory*)
Perusahaan Dagang merupakan perusahaan yang tidak menciptakan sendiri produk yang akan dijualnya. Perusahaan dagang menjalankan kegiatan usaha seperti membeli dan menyimpan produk, untuk kemudiandijual tanpa mengubah ataupun melewati proses pengolahan apapun itu dari suatu Perusahaan tersebut. Oleh karena itu, persediaan yang dimiliki Perusahaan dagang hanya dalam persediaan penjualan obat dan persediaan lain-lain tanpa memiliki persediaan dalam proses (*Work In Process*).
2. Persediaan pada Perusahaan Manufaktur (*Manufacture Inventory*).
Perusahaan Manufaktur merupakan perusahaan yang mengolah bahan

mentah menjadi produk barang jadi (*Finished good*), sehingga dapat menambah nilai guna dari suatu barang tersebut. Klasifikasi persediaan pada Perusahaan manufaktur terdiri atas bahan baku (*RawMaterial*), Persediaan barang dalam proses (*Work In Process*), Barang jadi (*FinishedGoods*). Bahan Baku (*Raw Material*) merupakan persediaan yang dibeli oleh Perusahaan dan akan digunakan sebagai bahan utama sebagai produksi suatu produk manufaktur. Barang dalam Proses (*Work In Proses*) merupakan persediaan yang sedang diolah menjadi produk akhir. Barang Jadi (*Finished Goods*) merupakan persediaan yang telah melalui semua produk produksi sehingga menjadi produk jadi yang siap dijual oleh Perusahaan.

Berdasarkan jenis-jenis persediaan, dapat disimpulkan bahwa persediaan merupakan pengklasifikasian persediaan itulah sangat penting bagi perusahaan dagang dan manufaktur. Klasifikasi yang tepat akan membantu pencatatan, dan penilaian persediaan serta pengambilan Keputusan terkait dengan suatu persediaan.

2.4.3 Fungsi-Fungsi Persediaan

Fungsi utama persediaan berperan sebagai penyangga, penghubung antar proses produksi serta distribusi untuk mendapat efisiensi. Efisiensi suatu organisasi dapat ditingkatkan karena berbagai fungsi penting dalam persediaan. Persediaan ini mungkin tetap tinggal diruang penyimpanan, gudang, pabrik, atau sedang dalam pemindahan sekitar pabrik. Menurut Heizer dan Render (2015:553) persediaan memiliki fungsi yang menambah fleksibilitas operasi Perusahaan tersebut yaitu:

- a) Untuk mengambil keuntungan dari potongan jumlah karena pembelian dalam jumlah yang cukup besar dapat menurunkan biaya pengiriman barang.
- b) Untuk memberikan pilihan yang terbaik untuk memenuhi permintaan pelanggan yangantisipasi dan memisahkan Perusahaan dari fluktuasi permintaan.

Menurut Handoko (2017:335-336) persediaan memiliki berbagai fungsi yang menambah fleksibilitas operasi perusahaan, fungsi persediaan tersebut sebagai berikut:

- a) Fungsi *decoupling* kemungkinan operasi Perusahaan internal dan eksternal mempunyai kebebasan. Persediaan *decoupling* ini memungkinkan Perusahaan dapat memenuhi permintaan langganan tanpatergantungan pada *supplier*.
- b) Fungsi *economic lot sizing* melalui penyimpanan persediaan, Perusahaan dapat memproduksi dan membeli sumber daya dalam

kuantitas yang dapat mengurangi biaya per unit. Persediaan *lot size* perlu mempertimbangkan penghematan pembelian, biaya pengangkutan per unit lebih murah karena suatu Perusahaan akan melakukan pembelian dalam kuantitas yang lebih besar, dibandingkan dengan biaya yang timbul karena adanya persediaan.

- c) Fungsi Antisipasi Perusahaan yang sering menghadapi fluktuatif permintaan yang dapat diperkirakan diramalkan berdasarkan pengalaman atau data masa lalu yaitu permintaan musiman. Dalam hal ini perusahaan dapat mengadakan persediaan musiman.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi persediaan yaitu akan memperlancar jalannya operasi perusahaan. Persediaan juga dapat memanfaatkan suatu siklus pesanan dan diskon seperti harga pembelian suatu persediaan dalam jumlah besar dari pemasok serta akan menghadapi perubahan yang tak terduga dalam suatu konsumen persediaan.

2.4.4 Biaya-biaya Dimasukkan dalam Persediaan

Persediaan pada perusahaan dagang dan manufaktur sangat mempengaruhi neraca dan laba rugi. Persediaan yang dimiliki perusahaan selama satu periode harus dapat dipisahkan dengan persediaan yang telah dijadikan sebagai beban yang akan dilaporkan ke dalam laporan laba rugi dan persediaan yang belum terjual akan menjadi persediaan untuk dilaporkan ke dalam neraca.

Menurut SAK EMKM No. 9 (2018: 21), “Biaya perolehan persediaan mencakup seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi siap digunakan”. Kebijakan Akuntansi yang terdapat dalam SAK EMKM juga menyatakan bahwa jika SAK EMKM secara spesifik mengatur perlakuan akuntansi atas suatu transaksi, peristiwa, atau keadaan lainnya, maka entitas menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan peraturan yang ada dalam SAK EMKM, tetapi jika SAK EMKM tidak secara spesifik mengatur perlakuan akuntansi atas suatu transaksi peristiwa, atau keadaan lainnya, maka entitas hanya mengacu pada dan mempertimbangkan definisi, kriteria pengakuan, dan konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan, dan beban, serta prinsip pervasif.

Penentuan harga perolehan biaya-biaya akan dimasukkan ke dalam persediaan, baik dalam bentuk biaya langsung maupun tidak langsung yang akan mempengaruhi nilai persediaan yang dimiliki. Menurut Heizer dkk (2017:533)

biaya-biaya yang timbul dari persediaan adalah sebagai berikut:

1. Biaya penyimpanan (*Holding Cost*), biaya yang dikeluarkan Perusahaan terkait dengan menyimpan barang persediaan selamawaktu tertentu.
2. Biaya Pemesanan (*Ordering Cost*), biaya pemesanan, pembelian, biaya pengiriman, dukungan administrasi dan seterusnya untuk memesan jumlah barang yang dibutuhkan. Ketika pemesanan sedang diproduksi, biaya pemesanan juga ada, tetapi mereka adalah bagian dari biaya penyetelan.
3. Biaya Penyetelan (*Setup Cost*), biaya untuk mempersiapkan sebuah mesin atau proses untuk membuat sebuah pemesanan. Ini menyertakan waktu dan tenaga kerja untuk membersihkan serta mengganti peralatan atau alat penahan. Manajer operasional dapat menurunkan biaya pemesanan dengan mengurangi biaya penyetelan serta menggunakan prosedur yang efisien seperti pemasangan dan pembayaran elektronik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua biaya pembelian akan ditambah dengan biaya lainnya yang terjadi selama proses produksi. Hal ini dilakukan agar suatu persediaan dapat diketahui nilainya setiap terjadinya proses produksi dan dapat menghitung harga jual secara tepat.

2.4.5 Sistem Pencatatan Persediaan

Sistem pencatatan persediaan dalam akuntansi yang tepat dan pencatatan yang selalu terkini (*Update*) tersebut sangat penting dikarenakan penjualan maupun pelanggan dapat berpindah tempat akibat terjadinya pesanan yang tidak sesuai. Persediaan harus meneliti serta menguasai biaya-biaya yang akan dikeluarkan akibat terjadi penumpukan persediaan. Terdapat dua jenis sistem pencatatan persediaan menurut Keiso, dkk (2018: 370) yaitu:

1. Sistem Pencatatan Persediaan Perpetual
Merupakan dalam metode pencatatan perpetual, perusahaan akan mencatat setiap kali terjadinya transaksi yang mempengaruhi persediaan seperti pembelian, penjualan, retur pembelian. Dalam sistem ini setiap pembelian akan di jurnal dalam akun persediaan barang dagang, penjualan akan di jurnal pada akun penjualan dan harga pokok penjualan juga di jurnal.
2. Sistem Fisik/Periodik
Merupakan penggunaan fisik mengharuskan adanya perhitungan barang yang masih ada pada tanggal laporan keuangan. Perhitungan persediaan ini diperlukan untuk mengetahui berapa jumlah barang yang masih ada dan kemudian diperhitungkan harga pokoknya. Dalam metode ini mutasi persediaan barang tidak, diikuti dalam buku-buku, setiap pembelian barang dagang dicatat dalam rekening pembelian.

Berdasarkan metode pencatatan persediaan menurut para ahli di atas, maka disimpulkan bahwa metode pencatatan persediaan terbagi menjadi dua yaitu metode periodik (fisik) dan metode perpetual (buku), namun apabila dibandingkan cara pencatatan yang lebih baik adalah metode perpetual yang dapat membantu perusahaan. Untuk mengetahui jumlah persediannya sewaktu-waktu dan kapan saja tanpa harus melakukan pengecekan secara langsung ke gudang serta mempermudah perusahaan dalam penyusunan laporan rugi dan neraca padaakhir periode akuntansi.

2.4.6 Metode Penilaian Persediaan

Perusahaan yang baik akan selalu mempertimbangkan dampak akibat pemilihan asumsi arus biaya dalam laporan laba rugi yang dapat mempengaruhi data pada laporan keuangan. Menurut SAK EMKM (2018:21) penilaian persediaan dijelaskan sebagai berikut:

1. Entitas mengakui persediaan ketika persediaan diperoleh sebesar biaya perolehannya, sedangkan biaya perolehan persediaan mencakupseluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lainnya.
2. Teknik pengukuran biaya persediaan dapat menggunakan metode eceran jika hasilnya mendekati biaya perolehan. Penilaian persediaan entitas dapat memilih menggunakan rumus biaya MPKP atau masuk pertama keluar pertama atau rata-rata tertimbang dalam menentukan biaya perolehan persediaan.

Menurut PSAK No.14 (2018), “Pengukuran persediaan pada saat perolehan adalah sebesar biaya yang terjadi dari semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biayalain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai”. PSAK No. 14 (2018) menyatakan bahwa pengukuran persediaan dapat dihitung dengan metode perhitungan persediaan yang terdiri dari:

1. Metode *First In First Out* (FIFO), mengasumsikan bahwa barang yang dijual terlebih dahulu adalah barang yang dibeli pertama kali. Metode *First In First Out* (FIFO) adalah metode yang menganggap barang yang dibeli lebih dulu maka akan dijual lebih dulu, sehingga harga perolehan yang dibeli pertama kali akan dibebankan lebih dahulu sebagai harga dalam persediaan.
2. Metode Identifikasi Khusus, mengidentifikasi setiap barang yang dijual dansetiap barang dalam persediaan. Biaya barang yang telah terjual dimasukkandalam harga pokok penjualan, sedangkan biaya barang-barang khusus yang masih ada berada ditangan dimasukkan pada persediaan. Perusahaan yang menggunakan metode ini, jika memiliki persediaan yang dapat diidentifikasi pada saat penjualannya tidak

dapat disubsitusikan. Setiap barang yang dibeli dan dimasukkan ke Gudang penyimpanan harus diberi stempel atau tanda pengenal. Dalam tanda pengenal tersebut harus dicantumkan harga pembelian barang yang bersangkutan sehingga pada akhir periode untuk mengetahui nilai persediaan akhir barang cukup dengan melihat dan memperhitungkan jumlah sisa barang itu beserta harga perolehannya.

3. Metode Rata-rata Tertimbang (*AVERAGE*), metode ini akan membebaskan harga pokok rata-rata pada nilai barang yang akan dijual. Metode rata-rata agar dapat mengurangi dampak dari fluktuasi harga. Metode ini disebut metode rata-rata tertimbang, di mana pada metode rata-rata tertimbang, setiap barang ditentukan berdasarkan biaya rata-rata tertimbang dari barang tersebut pada awal periode dan biaya pembelian barang atau biaya produksi selama periode tertentu. Perhitungan dapat dilakukan secara berkala atau pada setiap penerimaan kiriman, tergantung keadaan perusahaan

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 4 (empat) metode perhitungan persediaan dalam mengukur nilai persediaan yaitu dengan metode FIFO, metode identifikasi khusus dan metode *Average*. Nilai persediaan diukur untuk dapat mengetahui nilai akhir persediaan yang dimiliki dan diolah perusahaan.

2.4.7 Perbandingan Metode MPKP dan rata-rata Tertimbang

Ada tiga metode penilaian persediaan, yaitu metode FIFO (*First In First Out*) atau yang dikenal masuk pertama keluar pertama, LIFO (*Last In First Out*) atau barang yang terakhir masuk adalah barang yang pertama masuk, dan *Average* atau rata-rata. Akan tetapi pada saat ini metode LIFO sudah tidak diakui oleh Indonesia. Maka dalam penelitian ini penulis hanya akan membahas dua metode saja, yaitu FIFO dan *Average*. Menurut Warren, dkk. (2017:354) menyatakan bahwa “Metode persediaan FIFO dan Rata-rata Tertimbang biasanya akan menghasilkan jumlah yang berbeda untuk Beban Pokok Penjualan, Laba Bruto, Laba Neto, dan Persediaan Akhir”. Menurut PSAK No. 14 (2018), metode FIFO dan *Average* didefinisikan sebagai berikut:

1. Metode *First In First Out* (FIFO)

Metode FIFO pertama kali dikenal dalam akuntansi keuangan sebagai salah satu metode dalam penilaian persediaan. Harga yang digunakan sebagai dasar dalam menilai persediaan barang dapat memakai harga lama atau harga baru. Metode ini sangat baik untuk menghindari persediaan yang rusak akibat penyimpanan dalam gudang yang cukup

lama juga sangat relevan dalam pencatatan persediaan yang disajikan berdasarkan harga terkini atau didasarkan pada harga baru untuk harga urutan yang terakhir. Berikut rumus-rumus yang akan digunakan dalam metode FIFO (*First in first out*):

- a. Menentukan persediaan akhir pada persediaan:

$$\text{Persediaan Akhir} = \text{Kuantitas} \times \text{Harga Pokok}$$

- b. Menentukan beban pokok penjualan pada perusahaan

$$\text{Laba Kotor} = \text{Penjualan} - \text{Beban Pokok Penjualan}$$

- c. Menentukan laba kotor pada persediaan:

$$\text{Beban Pokok Penjualan} = \text{Persediaan Awal} + \text{Pembelian} - \text{Persediaan Akhir}$$

2. Metode *Average*

Metode *Average* atau sering disebut dengan rata-rata tertimbang adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya per unit persediaan berdasarkan dengan rata-rata tertimbang dari unit yang serupa dan biaya unit yang dibeli selama satu periode. Caranya adalah dengan membiayai biaya semua barang yang tersedia dijual dengan yang tersedia untuk dijual dan hasilnya adalah biaya rata-rata per unit. Adapun rumus-rumus yang digunakan dalam metode *Average*:

- a. Menentukan harga pokok per unit persediaan:

$$\text{Harga Pokok per unit} = \frac{\text{Harga Pokok Persediaan Awal} + \text{Harga Pembelian}}{\text{Kuantitas Persediaan Awal dan Pembelian}}$$

- b. Menentukan Persediaan Akhir pada persediaan:

$$\text{Persediaan Akhir} = \text{Kuantitas Persediaan} \times \text{Harga Pokok}$$

- c. Menentukan beban pokok penjualan dan persediaan:

$$\text{Beban Pokok Penjualan} = \text{Persediaan Awal} + \text{Pembelian} - \text{Persediaan Akhir}$$

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa dalam metode ini jumlah harga pokok produk dalam suatu proses awal ditambahkan dengan biaya produk yang dikeluarkan dalam periode sekarang dibagi dengan unit produk untuk menghasilkan harga pokok rata-rata tertimbang. Harga pokok produksi yang dihasilkan oleh departemen adalah penjumlahan harga pokok dari departemen satu ditambahkan dengan departemen berikutnya secara bersangkutan.

2.4.8 Pengaruh Kesalahan Pencatatan Persediaan Laporan Keuangan

Kesalahan dalam mencatat jumlah persediaan barang akan mempengaruhi laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Kesalahan-kesalahan yang mungkin hanya berpengaruh pada periode yang bersangkutan atau mungkin mempengaruhi juga periode-periode berikutnya. Kesalahan-kesalahan ini bila diketahui harus segera dibuat koreksi baik terhadap rekening riel ataupun rekening nominal.

Menurut Yusuf (2011:396) menyatakan bahwa “Persediaan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam laporan keuangan perusahaan bahkan dapat dikatakan istimewa”. Persediaan dilaporkan dalam neraca dan juga dalam laporan laba rugi dalam penentuan harga pokok penjualan.

Kesalahan yang dapat terjadi dalam akuntansi pembelian, penjualan, dan persediaan akhir maka yang akan berpengaruh bukan hanya di neraca, tetapi juga berpengaruh di laporan laba rugi. Kesalahan dalam persediaan menurut Weygant, dkk (2018:309) akan mempengaruhi Laporan Laba Rugi dan Laporan Posisi Keuangan yaitu:

1. Pengaruh pada Laporan Laba Rugi Persediaan akhir dari satu periode akan secara otomatis menjadi persediaan awal periode berikutnya. Jadi, kesalahan persediaan akan mempengaruhi beban pokok penjualan maupun laba neto di dua periode.
2. Pengaruh pada Laporan Posisi Keuangan perusahaan dapat menentukan pengaruh kesalahan persediaan akhir terhadap laporan posisi keuangan menggunakan persamaan dasar akuntansi: $Aset = Liabilitas + Ekuitas$.
 - a. Apabila persediaan akhir mengalami lebih saji, maka aset dan ekuitas juga akan lebih saji, sedangkan liabilitas tidak berpengaruh.
 - b. Apabila persediaan akhir mengalami kurang saji, maka aset dan ekuitas juga kurang saji, sedangkan liabilitas tidak berpengaruh.

Berdasarkan dari kesalahan pencatatan persediaan menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa dampak dari kesalahan pencatatan tersebut akan mempengaruhi laba dalam laporan laba rugi. Kesalahan pencatatan persediaan ini akan mempengaruhi jumlah nilai persediaan dalam laporan posisi keuangan.